

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Sumber Daya adalah upaya untuk memperoleh kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Secara nyata suatu usaha pengelolaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari usaha maupun kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembangunan dengan meliputi berbagai aspek yang secara umum dilakukan untuk mendorong kesejahteraan hidup masyarakat. Lingkup dari suatu usaha pembangunan, pengembangan, maupun pemberdayaan dapat menjangkau berbagai bidang terapan dengan memanfaatkan aset lokal maupun SDA di sekitar lingkungan dimana masyarakat hidup dan menetap. Gagasan konsep pembangunan berkelanjutan yang datang dari pemerintah, di masa kini terbilang cukup relevan dengan sistem terintegrasi. Permasalahan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditopang dengan penguatan modal sosial, budaya, dan lingkungan dalam suatu lembaga atau kelompok masyarakat supaya memiliki kesamaan tujuan terutama dalam rangka meningkatkan nilai pembangunan. Modal sosial memiliki peran penting dalam merekatkan relasi kuat antar masyarakat, sehingga semakin tinggi modal sosial yang dimiliki oleh suatu keluarga/kelompok masyarakat, maka semakin tinggi besar peluang untuk bergerak secara kompak karena telah dilandasi dengan sikap (kesadaran) kolektif (Afifah *et al*, 2018).

Keberadaan masyarakat dan pemerintah dalam kaitannya dengan aspek modal sosial adalah sama-sama memiliki kontribusi terhadap sektor

pembangunan, terlebih lagi ketika hak-hak individu sudah terpenuhi dengan baik. Prasyarat untuk membangun kerjasama dan usaha untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan terutama dalam hal ekonomi mutlak untuk dipenuhi sesegera mungkin, dimana kompetensi maupun inovasi pemerintah baik tingkat pusat, daerah, wilayah, hingga desa sangat diperlukan. Menjunjung tinggi prinsip kesejahteraan sosial dan keadilan masyarakat juga menjadi prasyarat umum untuk melakukan pembangunan, penataan, serta pengembangan inovasi lokal dengan catatan bahwa tujuan utamanya adalah menggalang kesejahteraan sosial secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat. Serangkaian modal yang terpenuhi melalui kesadaran pihak pemerintah dan masyarakat tidak dapat tercipta secara alami tanpa adanya komitmen kuat serta kesadaran akan pemahaman terhadap keadaan.

Keseluruhan ekosistem sumber daya adalah modal alami dan merupakan komponen ekosistem di tengah-tengah kehidupan masyarakat, beserta makhluk hidup lain. Negara memegang kendali secara peraturan hukum walaupun dilandasi dengan prinsip pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan beberapa poin seperti mengatur tentang pengertian, perekonomian, dan pemanfaatan SDA, serta kesadaran untuk meresapi semangat dan prinsip kesejahteraan nasional. Keberadaan SDA di setiap wilayah hingga ke pelosok-pelosok Desa pada akhirnya bersifat sebagai komponen penggerak dalam skala nasional. Aspek fundamental lain yaitu terkait dengan kemampuan SDM dalam melakukan pengelolaan yang arif dan inovatif (Suntari, 2017).

Kebutuhan pokok manusia seiring berjalannya waktu tentu semakin memenuhi skala prioritas, mendesak, maupun bersifat kontinyu. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan pangan sebagai penunjang aktivitas dan produktivitas setiap waktu. Air merupakan salah satu kebutuhan wajib bagi setiap masyarakat karena sifat pemanfaatannya yang fleksibel dan memenuhi segala bidang kehidupan. Secara sifat, air merupakan SDA yang dapat diperbaharui keberadaannya melalui beberapa upaya antisipatif dan pemakaian wajar. Di sisi lain, era modern telah menggeser paradigma pemenuhan kebutuhan air yang pada akhirnya tidak hanya berfokus pada komponen untuk bertahan hidup. Akan tetapi, pengelolaan sumber air di masa kini juga merujuk pada kebutuhan lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Bisnis kelompok masyarakat di masa kini dalam menampung, mengelola, hingga melakukan pendistribusian air bersih ke berbagai wilayah lain semakin menciptakan kompleksitas kehidupan. Orientasi profit yang digalakkan oleh sebagian besar masyarakat terutama di wilayah Desa dalam melakukan manajemen sumber air adalah wujud pengelolaan inovatif.

Penjelasan pada paragraf di atas sejalan dengan pendapat dari Sundoro dalam Widayat (2018) yang menegaskan bahwa air merupakan salah satu materi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dengan segala aktivitasnya, sehingga merupakan kebutuhan pokok, dasar, fundamental, bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam periode jangka panjang. Selain itu kebutuhan akan air juga berpotensi memicu adanya kesenjangan, maupun krisis bagi kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat

apabila tidak terpenuhi secara ideal dan mendapat perhatian khusus dari lembaga berwenang untuk mengawasi serta mengatur pengelolaan hingga penyebaran.

Potensi melimpahnya sumber daya air identik ditemukan di kawasan pedesaan, pegunungan, maupun di desa-desa yang berada di wilayah kaki gunung. Maka dari itu tidak jarang pengelolaan potensi air dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat perekonomian serta kesejahteraan penduduk dengan pemanfaatannya tidak hanya menjadi konsumsi kelompok (swadaya) akan tetapi didistribusikan ke berbagai wilayah eksternal guna meningkatkan keuntungan materiil secara sah dan diawasi negara. Naluri inovatif dari suatu kelompok masyarakat maupun pemerintah desa merupakan substansi aktifnya pola pikir SDM di tingkat desa. Kekayaan alam yang bersifat sebagai aset lokal-alamiah pada akhirnya melebur menjadi kebutuhan primer dan sekunder bagi sebagian besar masyarakat, di sisi lain peran pemerintah desa tetap harus ada untuk menyelaraskan koridor hukum, lingkungan, pembangunan, kesejahteraan, serta prinsip pelestarian (Manab *et al*, 2020).

Rahadi (2016) memandang bahwa karakteristik suatu desa yang memiliki usaha atau inovasi pengelolaan sumber daya dapat dilihat dari kecakapan warga masyarakatnya yang peka dan tidak asing dalam bersikap adaptif (mengenali potensi lingkungan sekitar), serta melekat teknologi sebagai penunjang untuk melakukan cara-cara pengelolaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi baik dilakukan secara mandiri maupun berdikari (kelompok). Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 72/2005 tentang Desa bahwa pemerintah desa sebagai pihak otonom di wilayah nya

memiliki kedudukan pasti dan terfasilitasi dengan baik untuk memberikan *support system* dengan orientasi utama adalah menuju perikehidupan layak, makmur, dan sejahtera bagi masyarakat di dalamnya. Kendati demikian, inovasi dari pemerintah desa perlu dibangun sebagai modal besar untuk menciptakan cara, proses, maupun luaran baru sebagai nilai tambah dari segi produktivitas. Inovasi menjadi kunci pengembangan desa, tanpa inovasi pengelolaan potensi dengan cara biasa akan menghasilkan sesuatu yang biasa pula.

Desa Bekiring di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu contoh yang di dalamnya memiliki potensi air bersih dengan bersumber langsung dari lereng Gunung Wilis. Pemerintah Desa Bekiring dan beberapa kelompok swadaya masyarakat di desa Bekiring melalui upaya sadar, selama ini telah berinovasi untuk memanfaatkan potensi alami tersebut untuk meningkatkan taraf hidup. Distribusi air gunung di desa Bekiring telah mengalami perkembangan dari awal mula digalakkan usaha pengelolaan, hingga distribusinya hampir di beberapa wilayah pada seluruh Kecamatan bahkan hingga daerah Madiun dan Trenggalek. Sebagaimana pendapat dari Rahadi (2016) pada paragraf sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sekilas pemerintah desa Bekiring terkategori berada dalam langkah inovatif karena memunculkan cara, usaha, proses, serta produktivitas dalam meningkatkan nilai jual sehingga berdampak langsung terhadap masyarakat dalam dan luar desa karena keduanya sama-sama diuntungkan dengan benefit berkepanjangan.

Maka dari itu sangat menarik untuk meneliti tentang pengelolaan sumber air yang ada di Desa Bekiring hingga mengalami perkembangan usaha secara signifikan. Di sisi lain perlu untuk meneliti tentang konsep dan prinsip pengelolaan air bersih yang selama ini diimplementasikan oleh koperasi antara pemerintah Desa Bekiring dan kelompok masyarakat desa Bekiring dalam menjaga kelestarian air tanpa merusak ekosistem sumber daya air murni pegunungan, sehingga pemanfaatan maupun inovasi tetap berada dalam koridor yang wajar tanpa mengesampingkan filosofi pembangunan berbasis lingkungan hidup. Karena nya, usaha pengelolaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga yang bersumber dari desa Bekiring hingga hari ini masih tetap beroperasi aktif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penjelasan tentang inovasi pemerintah Desa Bekiring dalam usaha melakukan pengelolaan sumber di atas, maka rumusan masalah yang difokuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya ide pengelolaan sumber air oleh masyarakat desa Bekiring?
2. Bentuk pengelolaan apa yang sudah diterapkan di Desa Bekiring?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya ide dalam melakukan pengelolaan sumber air oleh masyarakat desa Bekiring.
2. Untuk mengetahui cara-cara dalam mengelola sumber daya air yang selama ini diterapkan oleh masyarakat desa Bekiring dari tahap awal hingga tahap distribusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Desa Bekiring

Pemerintah desa Bekiring dapat menjadikan penelitian sebagai aset tertulis desa dan sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak luar.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengerti bentuk pengelolaan, proses, hingga upaya distribusi secara konkrit yang dilakukan oleh pemerintah desa Bekiring karena penelitian ini bersifat menggali data secara langsung di lapangan.

3. Bagi Dosen

Dosen, peneliti, maupun akademisi mampu untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan, rujukan, maupun referensi ilmiah untuk melakukan pengembangan pada penelitian-penelitian lebih lanjut ke depannya.

E. Penegasan Istilah

Peneliti membuat semacam batasan atau pun konsep definisi istilah dalam memahami judul penelitian tentang **“Analisis pengelolaan sumber daya air di desa bekiring kecamatan pulung kabupaten ponorogo”** agar tidak terjadi kesalahan penafsiran diluar konteks sebenar-benarnya dari yang dimaksud. Yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Air

Sumber daya alam adalah semua kondisi dan fakta alam yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya tergantung pada aktivitas manusia (Hunter dkk dalam Kemdikbud, 2009).

Status sumber daya air yang ada di desa Bekiring merupakan kesatuan yang menopang terbentuknya kehidupan di Desa Bekiring serta pihak lain seperti masyarakat di seluruh kecamatan Ponorogo, Madiun, hingga Trenggalek. Keberadaan sumber daya air bersifat fleksibel dan tidak lepas dari unsur campur tangan masyarakat dan pemerintah desa Bekiring, karena sebagai manusia yang memiliki pengetahuan dan daya eksplorasi terhadap sektor-sektor SDA seperti tanah, air, udara, tumbuhan, matahari, sungai, dan lain sebagainya.

2. Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan – perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda- beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi- definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Menurut Wardoyo memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan ,pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,pengorganisasian,penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

F.Landasan Teori

Di bawah ini contoh teori yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian ini, sebagaimana penelitian terdahulu yang diperoleh dari tulisan Satria (2018). Sesuai dengan judul penelitian yang fokus terhadap kajian pengelolaan, maka landasan teori di bawah ini sangat berbanding lurus dengan topik penelitian dan disertai korelasi erat antara pembangunan dan pengelolaan yang sama-sama memerlukan perhatian khusus terhadap keseimbangan ekosistem alami (lingkungan SDA).

1. Hakikat Air Sebagai Sumber Daya Berkelanjutan

Keberadaan air merupakan hal mutlak dalam dimensi kehidupan masyarakat dalam skala global sekali pun. Air merupakan sumber daya berkelanjutan yang sifatnya mewarisi satu generasi hingga generasi selanjutnya, baik dari segi pengelolaan maupun pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di masa kini, berbagai pihak semakin menunjukkan atensi lebih terhadap keberadaan air sebagai suatu sumber daya murni sehingga lembaga sekelas pemerintah ikut andil dalam melakukan penataan, pembatasan, hingga tunjangan program dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih. Selain itu dalam rangka pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan air bersih secara rutin setidaknya membutuhkan unsur dukungan mutlak dari inisiatif pihak masyarakat (selain pemerintah) sehingga terbentuk kolaborasi

Menurut WHO dan UNICEF (2014) memaparkan sejumlah fakta dan teori bahwa kurang lebih terdapat 1,8 Milyar masyarakat mengkonsumsi air dengan kualitas buruk karena terpapar kontaminasi

feses. Permasalahan sanitasi air yang tingkat kebersihannya buruk pada akhirnya mendatangkan dampak lain mulai dari kematian sekitar 842 ribu orang pada tahun 2012. Sementara itu, akses mayoritas masyarakat dalam mengakses kebutuhan air minum berkualitas masih sangat minim terutama di negara-negara berkembang menurut temuan WHO dan UNICEF. Pada akhirnya kedua lembaga tinggi internasional tersebut mendatangkan teori baru dalam menyikapi persoalan air bersih, yakni adalah terkait dengan faktor kontribusi besar dari adanya kualitas dan kesadaran SDM untuk melakukan manajemen pengelolaan limbah cair serta efisiensi pemanfaatan secara ramah lingkungan. Maka dari itu, potensi kerugian besar bagi kebutuhan air masyarakat global maupun lokal dapat diminimalisir dan dicegah sedini mungkin.

2. Teori Pengelolaan & Pembangunan SDA Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Harus disadari bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam tentu mengandung resiko terjadinya perubahan pada ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak, baik yang bersifat negatif maupun yang positif (Pongoh, 2015).

3. Ciri-Ciri Pengelolaan & Pembangunan SDA Berwawasan Lingkungan

Pongoh (2015) menjelaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan yang berwawasan lingkungan memiliki ciri tertentu, yaitu adanya saling keterkaitan beberapa sektor, antara lain lingkungan dan masyarakat yang menyadari nilai dan potensi dari aset lokal sehingga muncul tindakan, sikap, maupun rasa syukur atas manfaat jangka panjang dari keberadaan SDA di sekitar. Suatu pengelolaan maupun pembangunan akan selalu berkaitan dan saling berinteraksi dengan lingkungan hidup. Ada pun ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan antara lain:

- a) Menjamin pemerataan dan keadilan;
- b) Menghargai keanekaragaman hayati;
- c) Menggunakan pendekatan integratif;
- d) Menggunakan pandangan jangka panjang.

Melihat 4 aspek di atas, tentunya sangat relevan jika dikaitkan dengan topik pada penelitian ini. Untuk itu, peneliti berusaha menjabarkan dari ke 4 aspek tersebut secara deskriptif. Yakni sebagai berikut:

a. Menjamin Pemerataan dan Keadilan

Pemerataan dan keadilan dalam konteks topik penelitian ini adalah lebih kepada sikap bijak masyarakat dan pemerintah desa Bekiring untuk mengatur pembagian jatah tampungan air, supaya tidak terjadi eksploitasi berlebihan melebihi kadar batas wajar dalam setiap waktu, serta membuat peraturan yang mampu untuk meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial termasuk faktor-faktor pemicunya.

b. Menghargai Keanekaragaman Hayati

Karena selain memperhatikan ekosistem manusia, penting juga untuk memperhatikan ekosistem tumbuhan dan hewan agar tetap terjadi keseimbangan pada mata rantai lingkungan hidup. Walaupun air merupakan sumber daya alam yang sifatnya dapat diperbaharui, namun esensi untuk mengedepankan sisi kualitas dan etika lingkungan hidup perlu untuk dibangun secara rutin. Etika dalam perilaku pemanfaatan terutama bersifat materiil, sebisa mungkin perlu berbanding lurus dengan penegakan disiplin dalam konsep, program, maupun tindakan.

c. Menggunakan Pendekatan Integratif

Pendekatan ini maksudnya adalah pendekatan secara menyeluruh, dengan melihat dan menegosiasikan berbagai terkait dengan langkah awal pemerintah desa Bekiring. Langkah awal pengelolaan belum diketahui secara spesifik dan akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Beberapa asumsinya adalah tentang pemerintah desa Bekiring telah melakukan pendekatan, sosialisasi, maupun negosiasi kepada warga-warga sekitar terutama dalam kategori tidak diuntungkan atau tidak memiliki sumber daya seperti warga lain. Atau mungkin saja sudah ada semacam ikatan kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak sehingga pengelolaan air di desa Bekiring dapat terus berlangsung hingga hari ini.

d. Menggunakan Pandangan Jangka Panjang

Hal ini memang sedikit sulit dilakukan mengingat efek yang timbul hari ini telah nampak dan dirasakan oleh warga sekitar. Maka dari itu

dalam penelitian ini juga difokuskan untuk menyelami segala aspek yang dimaksud, termasuk juga tentang perencanaan dan sikap pabrik dalam memandang keluhan warga (akibat pencemaran).

4. Teori Pengelolaan Samijaga

Menurut Prajudi dalam Yuliance (2019) menjabarkan secara lugas mengenai pengelolaan yang merupakan siklus aktivitas manusia untuk mencapai tujuan melalui cara pengendalian atas semua keberadaan sumber daya di sekitar. Lebih dari itu menurut Andrew dalam sumber kutipan yang serupa, mendefinisikan pengelolaan sebagai serangkaian aktivitas kolektif dengan beberapa manajemen dan implementasi *plan* (perencanaan) meliputi hubungan komunikasi dua arah antar penggerak dan pekerja dalam rangka menciptakan produk maupun jasa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengelolaan membutuhkan arahan yang tepat sasaran serta jalinan komunikasi secara baik bagi pihak-pihak yang berperan di dalamnya, atau dengan kata lain prasyarat tersebut memang tidak dapat ditawar keberadaannya demi terciptanya iklim profesionalitas. Tujuan dan orientasi sasaran yang sebelumnya telah ditentukan, pada langkah selanjutnya membutuhkan pelaksana dari unsur SDM baik bersifat individu, lembaga, kelompok/swadaya, maupun suatu instansi pemerintah.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat dikaitkan dengan judul pada penelitian ini, bahwa pemerintah desa Bekiring bersama-sama dengan sebagian besar masyarakatnya telah memenuhi kriteria dasar sebagai unsur pengelola suatu lingkungan hidup. Aset lokal berupa

sumber daya air memiliki potensi luar biasa apabila didukung dengan kepekaan SDM termasuk dari unsur masyarakat. Pemerintah desa Bekiring bersifat sebagai kontrol sosial terhadap sebagian besar masyarakat yang mendatangkan manfaat sumber air, karena tidak semua masyarakat memiliki bahan baku serta alat pelengkap untuk dapat menekuni usaha bisnis pendistribusian air minum ke berbagai wilayah. Maka dari itu dalam penelitian yang berjudul “Analisis Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air” ini akan dikaji secara eksplisit, dibandingkan, diuji keberadaannya menggunakan landasan teori sebagai pisau analisis mutlak.

Teori Samijaga mengedepankan prinsip saling terkait satu sama lain antar *stakeholder* dalam menyalurkan karya, dan produk yang didasari oleh terciptanya gagasan logis. Semakin banyak individu yang memiliki ketertarikan maka akan semakin mudah pengelolaan dilakukan karena proses manajemen SDM tidak memerlukan energi berlebih untuk mencapai kesepakatan (visi). Sebaliknya ketika muncul beberapa individu dengan sikap kontra, maka permasalahan tersebut menempati posisi paling dasar sebelum terciptanya tindakan kolektif. Maka dari itu lembaga maupun instansi selevel pemerintah Desa adalah alternatif untuk meminimalisir konflik horizontal bila sewaktu-waktu terjadi. Pemanfaatan SDA merupakan tantangan bagi individu & kelompok berkepentingan (*interest group*).

5. Konsep Tata Kelola Sumber Daya Alam

a) Konsep Tata Kelola Demokratis (*Democratic Governance*)

Konsep ini memandang bahwa permasalahan utama yang dimungkinkan untuk menjadi penghambat adalah harus dianalisa secara detail dan menyeluruh. Pembatasan permasalahan pengelolaan SDA tidak boleh hanya terpaku pada persoalan teknis maupun administratif belaka sehingga mengesampingkan segala potensi untuk berkembang. Tata kelola sumber daya alam yang demokratis menitikberatkan pada kehadiran segala pihak untuk terlibat aktif dalam merumuskan segala bentuk perencanaan dan penyelesaian sengketa, negosiasi, maupun urusan registrasi. Upaya pembaruan menjadi visi utama untuk menumbuhkan relasi dan eksploitasi SDA secara bijak, di sisi lain agar tidak terjadi ketimpangan sosial-ekonomi. Konsep tata kelola sumber daya alam yang demokratis lebih mencerminkan suatu proses politik yang diperebutkan, dan bukan sekadar kewenangan dan hak menurut ketentuan legal, apalagi sekadar prosedur teknis-administratif yang bersifat netral. Gerakan sosial yang berkemajuan akan secara otomatis terdorong melalui dinamika keadaan, selain itu kerangka acuan yang berbentuk peraturan Undang-Undang dapat diukur sampai sejauh mana peruntukannya bagi kalangan masyarakat atau dalam arti lain adalah aktor demokratisasi tata kelola SDA (Shohibuddin, 2016).

b) Konsep Keberpihakan Warga Miskin (*pro-poor policy*)

Shohibuddin (2016) menegaskan bahwa diperlukan upaya pembaruan untuk memperkuat relasi-relasi antar kelompok yang secara keadaan tidak seimbang (timpang) sehingga akan mampu untuk mengikis kemustahilan yang bersifat tendensi (memihak) terhadap individu/kelompok. Orientasi utama dari konsep keberpihakan terhadap warga miskin difokuskan pada kepentingan dan kebutuhan masing-masing kelompok/individu secara adil sehingga ketimpangan akan mengerucut seiring dengan kebijakan yang dilakukan. Ada sembilan karakteristik yang mereka berdua ajukan untuk menentukan sejauh mana suatu kebijakan terkait sumber daya alam bisa disebut pro-poor yaitu:

- Melindungi dan mentransfer kesejahteraan berbasis sumber daya alam
- Mentransfer kekuasaan politik berbasis sumber daya alam;
- Sadar kelas
- Sadar sejarah
- Sensitif gender
- Sensitif etnis;
- Meningkatkan produktivitas
- Mengembangkan sumber-sumber nafkah; dan
- Menjamin kepastian hak

c) Model Pembangunan Desa Inovatif

Menurut Suharyanto & Sofianto (2012) suatu perubahan paradigma pembangunan sejatinya lebih baik mengutamakan ukuran kualitas daripada sekedar jumlah (kuantitas) semata. Keseimbangan antara faktor kualitas dengan kuantitas juga merupakan kerangka acuan yang signifikan untuk menopang laju pembangunan. Suatu kegagalan dalam melakukan pengelolaan pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan liar, selanjutnya mampu menciptakan perspektif baru yang kuat untuk dijadikan subjek pembangunan. Konsep atau pun model pembangunan yang baik seharusnya memiliki faktor-faktor seperti:

- Pemerataan (equity)
- Pertumbuhan (eficiency), dan
- Keberlanjutan (sustainability)

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atau struktur sosial, kontribusi masyarakat, dan perhatian pemerintah. Sembari mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi secara berjenjang, penting untuk memperhatikan keterlibatan segenap stakeholder utama dalam lingkup kelompok. Pembangunan desa merupakan proses merespon tiga lingkungan desa (alam, budaya, sosial-ekonomi) dengan cara yang tepat, maka dalam pembangunan harus diperhatikan unsur lingkungan tersebut (Suharyanto & Sofianto).

G. Definisi Operasional

Menurut Noor (2011) definisi operasional merupakan parameter yang menentukan maupun mengukur garis besar dengan cara memanfaatkan variabel dari topik dalam suatu penelitian seperti karakteristik, tindakan, ide, gagasan, kebijakan, kesepakatan, aspek pendukung lain.

Indikator dalam penelitian berjudul “**Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air Di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**” ini dapat ditemukan berdasarkan data observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak berkompeten dalam menjawab persoalan pengelolaan sumber daya air di Desa Bekiring. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

Indikator inovasi dapat diukur dari:

1. Melatarbelakangi munculnya pengelolaan adalah masyarakat sadar akan SDA sekitar yang melimpah dan juga karena bisa menunjang ekonomi masyarakat setempat
2. Bentuk pengelolaan masyarakat Desa Bekiring dalam pengelolaan air dilakukan secara gotong-royong dan terkoordinasi oleh BUMDES
3. Pemanfaatan Sumber Daya Air di Desa Bekiring dikelola secara swadaya oleh warga masyarakat melalui kontrol pemerintah desa
4. Pemanfaatan air untuk keperluan komersil, diikat dengan kewajiban setoran sebesar Rp.25.000 per truk tangki dari warga masyarakat kepada pemerintah desa bekiring.
5. Pengadaan fasilitas penampung dan penyalur air di beberapa titik yang terhubung langsung dengan sumber air.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian bersifat deskriptif-kualitatif sebagai menitikberatkan pada kerincian suatu kondisi saling mempengaruhi, penafsiran dari peneliti terkait hubungan sebab-akibat dalam suatu fenomena yang hendak digali keberadaannya baik fenomena tersebut sedang berlangsung maupun telah berlangsung (Sukamadinata, 2005).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Bekiring Kec. Pulung Kab. Ponorogo karena lokasi ini memiliki aset lokal berupa kekayaan alam hayati dalam bentuk sumber mata air murni, sehingga pemerintah dan masyarakat melakukan kerjasama dan hubungan saling koordinasi untuk mengelola air hingga dijual ke luar wilayah. Kekayaan sumber daya air yang ada di Desa Bekiring tidak lepas dari dukungan tata letak geografis yang berada di bawah lereng Gunung Wilis.

3. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yakni memilih perwakilan dari suatu kelompok dan ditentukan berdasarkan kriteria ideal atau kompeten untuk dapat menjawab persoalan suatu permasalahan dengan baik (Suhartono, 2011)

- a. Kepala Desa Bekiring
- b. Beberapa unsur perangkat yang berkompeten dalam menjawab bidang pengelolaan air

- c. Kelompok swadaya masyarakat yang memiliki truk tangki penampung air
- d. Mahasiswa setempat sebagai kontrol sosial dalam menyoroti persoalan ekonomi, kesejahteraan, hingga lingkungan.
- e. Ketua BUMDES selaku pimpinan pengelola
- f. Petani setempat selaku perairan sawah

4. Teknik Penggalian Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian deskriptif-kualitatif berjudul “**Analisis Inovasi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**” ini dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui:

- a. Observasi/pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mengetahui kegiatan yang di laksanakan
- b. Wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau informasi secara langsung ke subjek agar mengetahui hasil tujuan penelitian yang mendalam, berdasarkan pengalaman selama lebih dari 1 bulan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpatokan pada penelitian kualitatif, oleh karena itu peneliti mengambil petunjuk yang dikembangkan oleh para ahli peneliti kualitatif, seperti konsep milik Miles & Hubberman (1992) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penggalian Data

Proses pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan aktivitas wawancara dan observasi lapangan secara langsung kepada informan yang telah ditetapkan.

b. Reduksi data

Kegiatan yang meliputi revisi maupun memperbaiki susunan data lapangan dengan tujuan menciptakan efisiensi dan terwujudnya sistematis data secara lebih baik. Proses reduksi data dapat dilakukan sepanjang waktu oleh peneliti sepanjang tidak mengurangi substansi yang sebenarnya, perubahan narasi atau kalimat boleh dilakukan baik selama masa penelitian maupun usai masa penelitian berlangsung.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan menampilkan dengan penambahan berbagai visualisasi berupa tabel, grafik, gambar, suara, maupun video dengan tujuan memudahkan pemahaman bagi para pembaca.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Miles & Hubberman menjabarkan 3 cara untuk menganalisis data kualitatif, yaitu (reduksi data, penyajian data & penyimpulan). Fase Reduksi data adalah (proses pemangkasan dengan menekan pada perampingan data mentah tertulis). Presentasi data adalah aktivitas yang memungkinkan peneliti melakukan perbaikan narasi. Sedangkan kesimpulan adalah hak bebas peneliti menyusun ulang kalimat atau deksripsi informan namun tetap mengacu pada makna sebenarnya.

Gambar 1.1

Konsep Analisis Data Model interaktif

